

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Budi Kurniadi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana, Jl. Karapitan no.116,
40261, Bandung, Jawa Barat, (022) 4215717
kurnia170765@gmail.com

ABSTRAK

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan agenda reformasi birokrasi saat ini yang menitik beratkan pada peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Akuntabilitas merupakan salah satu asas *best practices* dalam pengelolaan keuangan Negara yang disusun secara periodik dalam penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Akuntabilitas Pemerintah Kota Bandung dilaksanakan sesuai dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik dan ini dibuktikan dengan peringkat A untuk penilaian SAKIP Kota Bandung. Pada kondisi tersebut upaya dan strategi optimal dilakukan pemerintah Kota Bandung sehingga mental dan sikap aparatur dapat berubah dan bersinergis kebijakan reformasi birokrasi.

Kata Kunci: kebijakan reformasi birokrasi, akuntabilitas, kinerja

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTABILITY POLICY IN BANDUNG CITY

ABSTRACT

The implementation of good governance is the current agenda of bureaucratic reform that focuses on increasing the accountability of government agencies the implementation of good governance is the current agenda of bureaucratic reform that focuses on increasing the accountability of government agencies Collusion and Nepotism. The research method used is the research method used in this study is a qualitative research method. The results showed that the implementation of the Bandung City Government Accountability policy was carried out in accordance with the demands of good governance and this was proven by rating A for the assessment of SAKIP in Bandung. In these conditions the optimal efforts and strategies of the Bandung city government so that the mental and attitude of the apparatus can change and synergize bureaucratic reform policies.

Keywords: *Bureaucratic reform policy, accountability, performance*

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Satu daerah di provinsi Jawa Barat yang mendapat nilai dengan predikat A adalah Kota Bandung, sementara 19 Kota dan Kabupaten lainnya masih pada peringkat B (77%). Perubahan pola pikir sebagai kunci utama reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bandung diwujudkan melalui penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi yang sudah terbangun dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimanakah implementasi kebijakan akuntabilitas publik dan untuk mengetahui, mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat capaian nilai akuntabilitas publik di Kota Bandung.

Urgensi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial khususnya Ilmu Pemerintahan pada konsentrasi kebijakan publik berkaitan dengan tata cara akan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam optimalisasi penerapan kebijakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Through out there are no complaints or no conflict, processes and procedures is an indication of the success of policy implementation”.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dapat mencermati pendapat Ripley dan Franklin (1982: 80-81): *“has been no word from the experts agree on the size of the successful implementation of the policy. While there is a measure to assess the fulfillment of the purpose, procedural, and impact, as well. In addition there who interpret the successful implementation of simple measures of the effectiveness of which appears in the mode*

of production. Other sizes that are loose and often used is the time required to produce some progress. The assumption is that the shorter the time taken to produce progress, the higher degree of success”.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sampai saat ini belum ada kata sepakat dari para ahli tentang ukuran keberhasilan implementasi kebijakan, karena dalam mengukur dengan menilai implementasi kebijakan ada yang mengukur terpenuhinya tujuan, prosedural maupun *impact* dengan baik. Selain itu ada pula yang mengartikan ukuran keberhasilan implementasi secara sederhana dilihat dari derajat efektivitas yang tampak. Ukuran lain yang sifatnya longgar dan seringkali digunakan adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan beberapa kemajuan, asumsinya adalah semakin pendek waktu yang ditempuh untuk menghasilkan kemajuan, semakin tinggi derajat keberhasilan sepanjang tidak ada keluhan atau tidak terjadi konflik begitu pula proses-proses dan prosedur-prosedur dijadikan indikasi mengenai keberhasilan implementasi kebijakan.

Mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dapat pula dilihat dari sejauh mana tujuan dapat dipenuhi (derajat efektivitas). Keberhasilan implementasi kebijakan pun mengacu pula

kepada adanya kepatuhan, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dampaknya yang dikehendaki dari semua program-program yang ada. Dengan demikian keberhasilan implementasi kebijakan identik dengan lancarnya proses pelaksanaan kebijakan yang ditandai dengan ketepatan dalam perencanaan, pengorganisasian dan pendanaan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Akuntabilitas pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan

suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dilakukan untuk memahami perilaku objek penelitian, sehingga dapat ditarik makna, ide-ide, sikap dan motif yang berkaitan dengan fokus yang diteliti. Moleong (2007:3) menyatakan bahwa pertimbangan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka

dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan; tidak harus menggunakan desain yang telah disusun secara ketat atau kaku sehingga tidak dapat diubah lagi.

Pengumpulan data dilakukan seperti dikemukakan Rusidi (1993:3-4) dan Nasution (1992:98-99) yaitu: “Turut sertanya seorang peneliti mengambil bagian dalam kegiatan objek yang diteliti, peneliti mempertajam dan memusatkan perhatian kepada hal-hal yang diinginkan di lapangan dan ada kalanya memaksakan diri untuk mengamati apa saja yang menarik perhatian dan relevan dengan objek yang diteliti”. Mengenai sumber data yang dipilih lebih mengutamakan *perspektif emic*. Sumber data terdiri dari: informan dan kondisi objek penelitian yang sesungguhnya serta informasi-informasi yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah dan sumber lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari perkembangan capaian SAKIP Kota Bandung secara progresif mengalami peningkatan dan tergambar dari kondisi capaian SAKIP sejak kepemimpinan Walikota/ Wakil Walikota periode 2009-2013 yang hanya mencapai 48,88 kemudian naik 1,45 poin menjadi 50,31. Titik awal capaian SAKIP 50,31 ini merupakan tantangan bagi periode kepemimpinan Walikota/ Wakil Walikota periode 2013-2018, tetapi pada tahun pertama indikasi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah Kota Bandung pada berbagai sisi menunjukkan hasil nyata dan ditunjukkan dengan meningkatnya capaian SAKIP sebesar 5 poin dari 50,31 menjadi 55,14.

Sinergitas berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui upaya Pembinaan Teknis (Bintek) yang terstruktur dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan motivasi yang sangat bermakna :”Nilai Sakip Kota Bandung Harus Menjadi Sakip Juara”, mampu mendongkrak capaian nilai SAKIP pada tahun 2015 sebesar 25,08 poin menjadi (80,22); 2016 (80,61); 2017 (80,37), walaupun secara kuantitatif capaian penilaian SAKIP mengalami

penurunan tetapi persentasi capaian Kota Bandung masih termasuk pada klasifikasi interval penilaian predikat A. Prestasi yang diraih Kota Bandung selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, bukan berarti tanpa rekomendasi hasil evaluasi dan evaluasi tersebut meliputi aspek-aspek :

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

1. Strategi Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Kota Bandung

Langkah-langkah strategis tentu harus disertai dengan berbagai strategi aksi yang efektif dan Kota Bandung dengan tegas telah menetapkan 5 (lima) langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan SAKIP juara yaitu: (1) memperkuat komitmen pemimpin; (2) penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP dan pendampingan dari Kemenpan.RB; (3) penguatan kapasitas dan kesungguhan Kepala SKPD; (4) Membangun SILAKIP; dan (5) langkah strategi juara. Kota

Bandung Juara ditetapkan kedalam 9 (sembilan) strategi yaitu: 1) Strategi Kepala SKPD memaparkan pelaksanaan SAKIP SKPD; 2) Strategi memberikan warna merah pada pelaksanaan SAKIP; 3) Strategi penanda tangenan perjanjian kinerja dan cascading; 4) Strategi pemaparan sekretaris/ Kepala Bagian /Tata Usaha; 5) Strategi kehadiran pimpinan pada acara SAKIP; 6) Strategi menggunakan media sosial; 7) Strategi penandatanganan kesepakatan bersama mewujudkan SAKIP Juara; 8) Strategi Optimalisasi tim monev SAKIP dan *Roadshow* Monev; 9) Strategi optimalisasi tim verifikasi.

Untuk merealisasikan langkah-langkah strategis tersebut, perubahan kuat yang dilakukan berfokus pada penyusunan indikator kinerja yang berorientasi kepada hasil, sehingga dengan bertahap dan waktu yang relative cepat terjadi perubahan positif pada pemahaman kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan kinerja serta tumbuhnya budaya organisasi untuk terus melakukan berbagai pembahasan dan diskusi tentang SAKIP secara masif.

Penguatan kapasitas Kepala-kepala SKPD dalam upaya mencapai nilai maksimal SAKIP merupakan hal mendasar yang harus dilakukan, karena dengan

penguatan ini akan menumbuhkan pemahaman dan tanggung jawab kepala SKPD berkaitan dengan komponen SAKIP berupa perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Dengan penguatan ini memiliki konsekuensi terhadap penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik yang semuanya bertumpu kepada tanggung jawab kepala SKPD.

Dalam kaitan ini pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal utama terutama dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang terintegrasi antara akuntabilitas keuangan dengan akuntabilitas kinerja sebagai wujud penerapan prinsip transparansi. Upaya penguatan penerapan SAKIP ini salah satunya diwujudkan melalui strategi transparansi pelaksanaan SAKIP Kota Bandung untuk publik melalui aplikasi SILAKIP *online* dengan alamat lakip.bandung.go.id. Melalui aplikasi ini publik dengan mudah dapat melihat dan menilai kinerja pemerintah Kota Bandung.

Dinamika pemerintah dalam merealisasikan akuntabilitas publik bergerak secara progresif dan kuncinya adalah hasil evaluasi kinerja yang telah dicapai berupa poin capaian tahun sebelumnya selain sinergitas berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan

melalui upaya Pembinaan Teknis (Bintek) yang terstruktur dan sosialisasi Peraturan Pemerintah. Komponen, bobot dan sub komponen SAKIP yang menjadi acuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Komponen, Bobot, dan Sub Komponen SAKIP

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Secara umum berbagai kelemahan penerapan SAKIP di Kota Bandung berkisar pada beberapa komponen yaitu: (1) Lemahnya dukungan atau komitmen pemimpin; (2) Resistensi terhadap perubahan; (3) Lemahnya pemahaman tentang akuntabilitas kinerja; dan (4) Kurang andalnya data kinerja.

Strategi yang efektif untuk mencapai nilai yang optimal harus berorientasi pada indikator kinerja yang berorientasi kepada hasil, sehingga dengan bertahap dan waktu yang relatif cepat terjadi perubahan positif untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan kinerja serta

tumbuhnya budaya organisasi untuk terus melakukan berbagai pembahasan dalam diskusi tentang SAKIP secara masif. Penguatan kapasitas Unit-Unit, Kepala-kepala SKPD dalam upaya mencapai nilai maksimal SAKIP merupakan hal mendasar yang harus dilakukan, karenadengan penguatan ini akan menumbuhkan pemahaman dan tanggungjawab kepala SKPD berkaitan dengan komponen SAKIP tersebut.

Dalam kaitan ini pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal utama terutama dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang terintegrasi antara akuntabilitas keuangan dengan akuntabilitas kinerja sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dapat diwujudkan melalui aplikasi SILAKIP online sehingga publik dengan mudah dapat melihat dan menilai kinerja pemerintah.

Secara umum berbagai kelemahan penerapan SAKIP di Kota Bandung berkisar pada beberapa komponen yaitu: (1) Lemahnya dukungan atau komitmen pemimpin; (2) Resistensi terhadap perubahan; (3) Lemahnya pemahaman tentang akuntabilitas kinerja; dan (4) Kurang andalnya data kinerja.

Strategi yang efektif untuk mencapai nilai yang optimal harus

berorientasi pada indikator kinerja yang berorientasi kepada hasil, sehingga dengan bertahap dan waktu yang relatif cepat terjadi perubahan positif untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan kinerja serta tumbuhnya budaya organisasi untuk terus melakukan berbagai pembahasan dalam diskusi tentang SAKIP secara masif. Penguatan kapasitas Unit-Unit, Kepala-kepala SKPD dalam upaya mencapai nilai maksimal SAKIP merupakan hal mendasar yang harus dilakukan, karena dengan penguatan ini akan menumbuhkan pemahaman dan tanggung jawab kepala SKPD berkaitan dengan komponen SAKIP tersebut.

Dalam kaitan ini pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal utama terutama dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang terintegrasi antara akuntabilitas keuangan dengan akuntabilitas kinerja sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dapat diwujudkan melalui aplikasi SILAKIP online sehingga publik dengan mudah dapat melihat dan menilai kinerja pemerintah.

2. Implementasi Sistem Manajemen Pelayanan Pemerintah Kota Bandung

Berdasarkan hasil penelitian dapat diungkap bahwa implementasi kebijakan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota

Bandung diarahkan untuk mengubah mental dan perilaku aparatur. Penerapan sistem manajemen pelayanan Kota Bandung belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas, sehingga orientasi yang dilakukan memperhatikan keterkaitan antara berbagai dimensi kebijakan yang berlaku. Dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Implementasi Perubahan Mental dan Perilaku Aparatur

Kebijakan Reformasi birokrasi di Kota Bandung merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025, maka untuk dalam melaksanakan optimalisasi fungsi birokrasi diarahkan secara tepat, cepat, dan konsisten untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel melalui berbagai pembaharuan

dan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandung sejalan dengan delapan area kebijakan reformasi pada seluruh aspek manajemen pemerintahan. Kedelapan area perubahan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Implementasi 8 Area Perubahan

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani merupakan dasar dalam mencapai misi Wali Kota Bandung menyangkut profesionalisme aparatur, infrastruktur, dan lingkungan yang nyaman, kondisi sosial kemasyarakatan yang madani yang memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan segala persoalan yang muncul secara swadaya, serta perekonomian kota yang mantap dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah dan area kebijakan reformasi birokrasi pada tahap implementasinya di

Kota Bandung masih dihadapkan berbagai ketimpangan pada berbagai dimensi pemerintahan diantaranya menyangkut ketaatan dan kepatuhan, profesionalitas, netralitas, etika dan disiplin Aparatur Sipil Negara sebagai subjek penggerak reformasi birokrasi. Etika birokrasi pemerintahan berkaitan erat dengan moralitas dan mentalitas aparatur dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok pemerintahan secara umum belum berorientasi kepada nilai-nilai etika yang harus di pedomani secara operasional meliputi :

- 1) Aparat wajib mengabdikan kepada kepentingan umum
- 2) Aparat adalah motor penggerak “head” dan “heart” bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Aparat harus berdiri di tengah-tengah, bersikap terbuka dan tidak memihak (mediator).
- 4) Aparat harus jujur, bersih dan berwibawa.
- 5) Aparat harus bersifat diskresif, bisa membedakan mana yang rahasia dan tidak rahasia, mana yang penting dan tidak penting.
- 6) Aparat harus selalu bijaksana dan sebagai pengayom.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian ini ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Secara umum berbagai kelemahan Implementasi Kebijakan Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) berkisar pada beberapa komponen yaitu: (1) Lemahnya dukungan atau komitmen pemimpin; (2) Resistensi terhadap perubahan; (3) Lemahnya pemahaman tentang akuntabilitas kinerja; dan (4) Kurang andalnya data kinerja.
2. Strategi yang efektif untuk mencapai nilai yang optimal harus berorientasi pada indikator kinerja yang berorientasi kepada hasil, sehingga dengan bertahap dan waktu yang relatif cepat terjadi perubahan positif untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan kinerja serta tumbuhnya budaya organisasi untuk terus melakukan berbagai pembahasan dalam diskusi tentang SAKIP secara masif.
3. Penguatan kapasitas Unit-Unit, Kepala-kepala SKPD dalam upaya mencapai nilai maksimal SAKIP merupakan hal mendasar yang harus dilakukan, karena dengan penguatan ini akan menumbuhkan pemahaman dan tanggung jawab

kepala SKPD berkaitan dengan komponen SAKIP berupa perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Dengan penguatan ini memiliki konsekwensi terhadap penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik yang semuanya bertumpu kepada tanggungjawab kepala SKPD.

Rekomendasi dari hasil kajian yang dapat diberikan diantaranya adalah: (1) Seluruh pimpinan instansi pemerintah Kota Bandung harus memiliki pemahaman dan komitmen yang tinggi dalam merespons perubahan sejalan dengan tuntutan kebijakan reformasi dan hal ini bisa terbangun apabila pimpinan puncak Kota Bandung memberikan teladan serta melakukan monitoring yang intensif terhadap pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang begitu banyak di Kota Bandung; (2) Pemanfaatan teknologi informasi harus optimal dan menjadi hal utama terutama dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang terintegrasi antara akuntabilitas keuangan dengan akuntabilitas kinerja sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dapat diwujudkan melalui aplikasi *SILAKIP online* sehingga publik dengan mudah dapat melihat dan menilai

kinerja pemerintah; (3) Pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis bagi paratur merupakan prioritas utama dengan menghindari aspek-aspek seremonial dan rutinitas program yang tidak terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1982. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.*

Miles, Mattew B and Huberman, Michael A, 1984 , *Qualitative Data Analysis : A Sourccebook of New Mthods*, Beverly Hills: London Sage Publications.

Moleong, J. Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, S, 1988, *Metode penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito

Mahmudi, 2002, *Organisasi Sektor Publik*, Jakarta : Rajawali

Mardiasmo, 2002, *Akuntabilitas Publik*, Bandung: Grafika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sutopo & Suryanto. 2006. *Pelayanan Prima Modul Diklat Pra Jabatan Golongan III*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.